

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa guna meningkatkan perekonomian desa dan membangun hubungan sosial masyarakat desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa dalam suatu Desa memiliki peranan yang sangat penting terutama sebagai pilar perekonomian masyarakat, seperti Badan Usaha Milik Desa Mutiara Saghara yang bergerak dibidang eduwisata dan produksi garam yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, akan tetapi belum memiliki status berbadan hukum dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia, belum terdapat alat/teknologi yang memadai dan belum memiliki anggaran yang jelas, sehingga tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan badan usaha berada pada anggota badan usaha tersebut. Pemerintah dan sektor swasta memiliki peranan penting dalam membangun suatu hubungan relasi dengan masyarakat guna mewujudkan standar pelayanan minimal guna pengembangan komunitas desa yang lebih berdaya. Pemanfaatan dana sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta dalam kontrak publik dalam rangka pengembangan infrastruktur pariwisata desa khususnya di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan daerah. Bukan hanya karena keterbatasan pembiayaan semata, skema Kerjasama pemerintah swasta juga menjadi pen jembatan solusi bagi keterbatasan sumberdaya manusia dan keterbatasan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu wawancara kepada beberapa instansi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dengan analisa data menggunakan metode dekriptif kualitatif. Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa Mutiara Sahara, Skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta, Pemerintahan Desa

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises are a business institution managed by the village community and village government in order to improve the village economy and build social relations for village communities based on the needs and potential of the village. The establishment of Village-Owned Enterprises in a Village has a very important role, especially a pillar of the communitys economy, such the Mutiara Saghara Village-Owned Enterprise which is engaged in edutourism and salt production which has the potential to improve the welfare of the village community, but does not yet have legal entity status due to limited human resources, there are no adequate tools technology and do not have a clear budget, So that the responsibility for the management and development of the business entity rests with the members of the business entity. The government and the private sector have an important role in building a relationship with the community in order to realize minimum service standards for the development of more empowered village communities.

The utilization of private sector funds through the Public Private Cooperation scheme in public contracts in the context of developing village tourism infrastructure, especially in Bunder Village, Pamekasan

Regency, is expected to be a solution to regional limitations. Not only because of limited financing, the public private cooperation scheme is also a bridge solution for limited human resources and technological limitations. This research uses normative legal methods with a statutory approach and a conceptual approach. The source of legal material for this research consists of primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal material used is legislation while the secondary legal material used is interviews with several agencies. The data collection technique in this study is a literature study with data analysis using qualitative descriptive methods. Keywords : Mutiara Sahara Village-Owned Enterprises, Public-Private Cooperation Scheme, Village Government